



Buletin Parlementaria

Nomor 1108/III/VI/2020 • Juni 2020

Satgas DPR Pastikan Kebutuhan Makanan Warga Terdampak Covid-19 Terpenuhi



6 Libatkan TNI, Penerapan
New Normal Tetap
di Tangan Sipil



19 Implementasi Pemulihan
Ekonomi saat *New Normal*
Harus Cepat dan Tepat



9 772614 339005

Satgas DPR Pastikan Kebutuhan Makanan Warga Terdampak Covid-19 Terpenuhi

Satgas Lawan Covid-19 DPR RI yang dikomandoi oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad mengunjungi Posko Masak JS2 di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (6/6). Kunjungan yang turut didampingi Menteri BUMN Erick Thohir ini, untuk

memastikan pemenuhan kebutuhan makanan bagi warga terdampak Covid-19 terpenuhi dengan baik.

“Hari ini kami melakukan kunjungan lapangan terhadap kegiatan yang sudah dimulai sejak 5 Mei, sampai dengan berakhirnya PSBB nanti,” ujar Dasco kepada awak media. Dasco bersama rombongan Satgas Lawan Covid-19

DPR RI berkesempatan melihat secara langsung proses memasak makanan sebelum didistribusikan ke kepada masyarakat yang terdampak.

Dasco menjelaskan, sasaran diadakannya Posko Masak ini adalah untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi masyarakat. “Nanti (petugas) kelurahan yang ambil ke sini dan mendistribusikan ke wilayahnya masing-masing, sesuai yang sudah terdata untuk sebagai penerima bantuan,” terang politisi Fraksi Partai Gerindra itu lebih lanjut.

Tak hanya itu, Satgas Lawan Covid-19 DPR RI beserta rombongan juga berkesempatan makan siang di Posko Masak, menunya pun sama dengan yang akan didistribusikan kepada warga siang ini yaitu tumis kacang panjang dan sambal telur. “Masakannya sudah bagus, enak dan bersih, tentu saja bergizi,” jelas Dasco.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, bahwa Posko Masak ini merupakan wujud nyata dari partisipasi dan kerja sama antara Pemerintah dengan Wakil Rakyat, dan implementasinya berjalan baik. “Alhamdulillah sudah 480 ribu bungkus yang dibagikan di 11 titik Posko Masak di Jakarta. Tentu akan kita coba makanan itu, apakah benar-benar layak? Jangan sampai yang dibagikan itu tidak layak,” kata Erick.

Ia juga mengatakan, Posko Masak ini akan terus beroperasi hingga berakhirnya PSBB di Jakarta. “Karena kegiatan ini merupakan bagian dari protokol Covid-19, Posko Masak ini akan terus berjalan. Bukan sampai hari ini saja, namun sampai (penerapan) PSBB berakhir,” tandas Erick. ■ es/sf



Satgas Lawan Covid-19 DPR RI yang dikomandoi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dengan didampingi Menteri BUMN Erick Thohir mengunjungi Posko Masak JS2 di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Foto: Erman/AN



Kesehatan dan Ekonomi Harus Diperkuat secara Bersamaan



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto: Kresno/MAN

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani memastikan tatanan normal baru atau *new normal* yang akan diterapkan Pemerintah harus memperkuat kesehatan dan ekonomi secara bersamaan. Untuk itu, menurut Puan, *new normal* perlu diatur secara komprehensif di setiap sektor dan skenario, agar bisa bersamaan menjaga kesehatan rakyat sekaligus memutar kembali roda perekonomian Indonesia ke depannya.

"Ini penting karena *new normal* yang diperlukan Indonesia bukan yang memilih antara ekonomi dan kesehatan, tapi bagaimana keduanya bisa berjalan bersamaan," ujar politisi PDI-Perjuangan itu dalam keterangan tertulis yang diterima **Parlementaria**, Rabu (10/6).

Puan menyampaikan salah satu yang harus diperhatikan adalah kegiatan sosial dan ekonomi di pasar-pasar

tradisional. Diketahui, sudah ada laporan beberapa pedagang di pasar tradisional yang terinfeksi Covid-19. Itu menunjukkan, jika tidak ada penanganan yang tepat, maka pasar tradisional bisa menjadi sumber penularan.

Padahal, lanjut Puan, denyut nadi ekonomi daerah itu bisa terasa di pasar-pasarnya, yang juga menjadi salah satu tempat utama terjadinya interaksi sosial masyarakat sebuah daerah. "Maka, perhatian Pemerintah terhadap penetapan dan penerapan protokol *new normal* di pasar tradisional sangat dibutuhkan. Karena pasar tradisional adalah penggerak sektor riil ekonomi rakyat," jelas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah V itu.

Puan juga menekankan agar sosialisasi protokol *new normal* dilakukan secepat mungkin supaya dapat dipahami semua kalangan. Selain protokol *new normal* yang sangat rinci, diperlukan juga mekanisme monitoring dan evaluasi yang ketat. Terlebih, Puan mencatat pada Selasa (9/6) berdasarkan data Gugus Tugas Covid-19, ada penambahan 1.034 kasus positif Covid-19.

Karenanya, angka-angka seperti ini harus dimonitor ketat dan menjadi dasar pengambilan keputusan. Kendati demikian, Puan mengapresiasi target awal pengujian 10.000 spesimen dari tes Covid-19 sudah tercapai dan Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan ingin menaikkan target menjadi 20.000 per hari. Hal itu, lanjut Puan, agar sejalan dengan kebijakan *new normal* dan bisa menggerakkan ekonomi masyarakat, tanpa mengabaikan risiko kesehatan. ■ **ann/sf**



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I Tahapani, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindy, S.Sos, Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Amanda P, S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Irandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Pumtho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Riyan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha.

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie.

ANALIS MEDIA

Deprisa Citra Akbari, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoywati

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natallio, Fajar Suryanto

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Sartomo, S.S., M.Si (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

FOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Siti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Sugiyanto, S.E., Yudi Kresna

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Azis Syamsuddin Berharap Tak Ada Lagi Tindakan Rasisme

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin merasa prihatin atas terjadinya gelombang demonstrasi besar yang terjadi di Amerika Serikat akibat kematian warga kulit hitam AS, George Floyd. Menurut Azis, segala bentuk tindakan kekerasan tidak akan membawa keuntungan bagi pihak manapun. Untuk itu, Azis berharap agar tidak ada lagi rasisme atau tindakan melawan hukum yang berkembang di AS.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) tersebut mengungkapkan, tentunya sebagai negara sahabat, Indonesia menginginkan AS yang merupakan salah satu negara demokratis terbesar di dunia dapat kembali kondusif di tengah pandemi Covid-19. Pemaparan tersebut disampaikan Azis dalam keterangan resminya yang diterima *Parlementaria*, Kamis (4/6).

“Perkembangan yang terjadi di Amerika sepenuhnya urusan dalam negeri Amerika. Namun, saya meyakini fondasi demokrasi serta aturan hukum di Amerika mampu mengendalikan situasi yang sedang berkembang secara konstruktif. Pemerintah Amerika, seyogyanya dapat merangkul tokoh agama dan masyarakat untuk meredakan permasalahan ini. Jangan berlarut dan membawa dampak signifikan ke berbagai aspek,” ujar Azis.

Lebih lanjut politisi Fraksi Partai Golkar itu juga meminta agar masyarakat Indonesia yang masih berada di AS tidak ikut turun ke jalan. Hal itu, tegas Azis, guna mencegah terjadinya hal-



Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin. Foto: Jaka/MAN



SEGALA BENTUK TINDAKAN KEKERASAN TIDAK AKAN MEMBAWA KEUNTUNGAN BAGI PIHAK MANAPUN

hal yang tidak diharapkan. Azis menjelaskan, bahwa pemerintahan yang menganut sistem demokratis di seluruh dunia tentunya tidak menyukai adanya ketidakadilan, khususnya rasisme.

Seperti, sambung legislator dapil Lampung II itu, dimana Indonesia sendiri memiliki Undang-Undang

Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang mengatur tentang hal ini. Maka, Azis menyerukan jangan ada oknum yang mengadu domba dalam peristiwa tersebut dan perlu segera diluruskan serta ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Sehingga, *Law and Order* akan mampu di terapkan dengan baik dalam rangka memutus peredaran disinformasi maupun ‘*hate speech*’ dan segala bentuk ujaran kebencian di era digital saat ini. Sehingga, kita bisa kembali fokus menangani Covid-19 dan kembali menjalankan roda ekonomi serta penerapan ‘*New Normal*’ sesuai dengan tantangan global saat ini,” pungkasnya. ■ pun/sf

Jaga Stabilitas Pangan di Masa Pandemi dengan Menerapkan Nilai Pancasila

Wakil Ketua Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) DPR RI Rachmat Gobel menegaskan bahwa pemerintah harus segera merumuskan langkah-langkah konkret dalam menjaga stabilitas pangan Indonesia. Terlebih lagi, saat sedang terdampak pandemi Covid-19 saat ini.

“Pemerintah harus segera merumuskan langkah-langkah konkret dan tetap fokus pada peningkatan produksi pangan, distribusi dan menjaga harga pangan agar tetap stabil di masa pandemi Covid-19,” ungkap Gobel dalam Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Komisi I, III, IV, dan Pimpinan Banggar dengan Menteri Pertanian, Menteri

Perdagangan, Direktur Utama Bulog, Wakapolri, serta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di Gedung Nusantara II, Senayan Jakarta, Senin (8/6).

Menjaga stabilitas pangan Indonesia di masa pandemi Covid-19 ini, menurut Gobel salah satunya dengan cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan ekonomi. Misalnya, dengan selalu mengutamakan dan mencintai produk Indonesia. Termasuk, juga mengedepankan produksi pangan dalam negeri.

“Kita harus bisa mengutamakan produksi pangan dalam negeri untuk kebutuhan masyarakat. Jika semua itu diterapkan melalui konsumsi pangan lokal, maka Indonesia tidak akan tergantung lagi pada produk pangan impor,” tegas politisi Partai Nasdem ini.

Terkait dengan pendistribusian bahan pangan ke seluruh wilayah Indonesia di masa pandemi Covid-19 ini, Gobel berharap agar semua itu dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Terlebih lagi, saat ini beberapa wilayah di Indonesia tengah dan akan memasuki tatanan kehidupan baru (*new normal*).

Gobel menambahkan, tugas Pemerintah selanjutnya adalah terus mengedukasi dan meningkatkan sosialisasi protokol kesehatan dalam situasi *new normal* tersebut kepada masyarakat luas. Mengingat hal tersebut (protokol kesehatan) akan menjadi sebuah kebiasaan atau tradisi baru yang harus selalu dilakukan masyarakat Indonesia. ■ **ayu/es**



Foto bersama Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Komisi I, III, IV, dan Pimpinan Banggar dengan Pemerintah usai Rapat Konsultasi. Foto: Mario/MAN

Libatkan TNI, Penerapan *New Normal* Tetap di Tangan Sipil

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid mengatakan pelibatan TNI dalam penerapan kebijakan tatanan normal baru (*new normal*) tidak berarti bahwa supremasi sipil tergantikan oleh militer. Puncak kepemimpinan penerapan kebijakan tatanan normal baru, tetap berada di tangan Pemerintah sipil.

Hal itu disampaikan Meutya dalam webinar bertajuk “Pesiapan Dalam Menghadapi Tatanan Kehidupan Baru”, yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui aplikasi ZOOM, Jumat (5/6). Selain Meutya yang membawakan materi tentang tantangan dan peluang pelibatan TNI dalam menyongsong *new normal*, webinar yang dibuka oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate itu juga dihadiri Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir dan Direktur Jenderal IKP Kominfo Widodo Muktiyo.

Menurut politisi perempuan dari Fraksi Partai Golkar itu, posisi TNI dalam hal penerapan tatanan normal baru hanyalah membantu Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah dan Polri dalam menegakkan disiplin kepatuhan terhadap protokol kesehatan di masyarakat guna mencegah penyebaran Covid-19. “Pelibatan TNI dalam *new normal* harus dilihat secara menyeluruh dalam upaya penanganan wabah Covid-19,” kata Meutya.

Dia mengungkapkan, TNI pada dasarnya sudah dilibatkan bahkan jauh sebelum rencana penerapan tatanan normal baru. “TNI sudah dilibatkan sejak awal-awal merebaknya pandemi Covid-19 yakni dalam evakuasi pelajar Indonesia yang terjebak *lockdown* di Kota Wuhan, Tiongkok, serta dalam distribusi alkes ke berbagai daerah di

Indonesia,” ujar Meutya.

Secara konsitusi, lanjut legislator dapil Sumatera Utara I itu, pelibatan TNI dalam *new normal* juga sudah sesuai dengan Undang-Undang (UU) yang berlaku, seperti termaktub dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 pasal 7 ayat 2 (b) terkait tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP).

“Saya kira tidak perlu ada kekhawatiran soal pelibatan TNI. Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang melibatkan militernya dalam penanganan wabah Covid-19. Negara-negara barat yang demokratis seperti Inggris dan Italia juga melibatkan militernya dalam penanganan pandemi Covid-19,” jelas Meutya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir juga menyatakan hal yang sama. Dalam perspektif keamanan, peran Polri dalam pelaksanaan *new normal* tidak

lebih dari upaya menjaga keamanan sekaligus mengawasi dan mendorong semua pihak untuk disiplin dalam penerapan protokol kesehatan pelaksanaan *new normal*. Politisi Fraksi Partai Golkar itu mengatakan dalam penindakan pelanggaran protokol kesehatan, Polri diyakini akan mengedepankan pendekatan persuasif.

“Suksesnya program *new normal* bukan karena banyaknya aparat yang berjaga, bukan pula karena banyaknya aturan yang ada. Akan tetapi karena kita semua sadar betapa berharganya kesehatan kita,” kata Adies. Legislator dapil Jawa Timur I itu juga menambahkan di era keterbukaan informasi, masyarakat dapat melihat secara terbuka pelaksanaan disiplin oleh TNI-Polri. Sehingga, dapat turut mengontrol agar tetap dalam koridor persuasif dan profesional. ■ ann/sf



Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid saat rapat virtual. Foto: Runi/MAN

Helikopter TNI AD Jatuh, TB Hasanuddin Minta Investigasi

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendesak TNI segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap insiden jatuhnya Helikopter M-17 milik TNI AD di Kendal, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Ia mengaku merasakan adanya kejangalan dalam insiden itu, mengingat usia helikopter dengan nomor registrasi HA 5141 tersebut, masih tergolong baru dan layak digunakan.

“Pesawat yang jatuh belum terlalu tua tapi masih tergolong baru. TNI harus segera melakukan investigasi untuk mencari penyebabnya,” kata Hasanuddin dalam keterangan persnya yang diterima *Parlementaria*, Minggu (7/6). Menurutnya, helikopter ini jatuh bisa karena berbagai penyebab diantaranya cuaca, *human error* atau kerusakan mesin (*trouble engine*).

“Atau bisa juga disebabkan kemungkinan-kemungkinan lain. Nantinya hasil investigasi ini dapat dijadikan acuan untuk ke depannya,” jelasnya. Hasanuddin juga mengucapkan belasungkawa atas gugurnya 4 putra terbaik bangsa yang menjadi

”

**PESAWAT YANG
JATUH BELUM
TERLALU TUA TAPI
MASIH TERGOLONG
BARU. TNI HARUS
SEGERA MELAKUKAN
INVESTIGASI
UNTUK MENCARI
PENYEBABNYA**

korban dalam jatuhnya helikopter tersebut. “Saya mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya atas gugurnya putra terbaik bangsa dalam insiden tersebut,” kata politisi PDI-Perjuangan ini.

Seperti diketahui, Helikopter MI-17 milik TNI AD dengan nomor registrasi HA 5141 jatuh di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Sabtu (6/6/2020). Helikopter yang ditumpangi 11 kru tersebut sedang melaksanakan misi latihan terbang di Pusat Pendidikan Penerbang AD, Semarang Jawa Tengah sebagai bagian dari program Pendidikan Calon Perwira Penerbang 1. Kadispenad Brigjen TNI Nefra Firdaus mengatakan penyebab jatuhnya Helikopter MI-17 milik TNI AD masih dalam proses investigasi.

Akibat insiden tersebut, empat prajurit TNI AD gugur. Mereka adalah Kapten Cpn Kadek, Kapten Cpn Fredi, Kapten Cpn Y Hendro dan Lettu Cpn Wisnu. Sementara 5 penumpang helikopter ini yakni Lettu Cpn Vira Yudha, Praka Nanang, Praka Rofiq, Praka Supriyanto dan Praka Andi mengalami luka serius dan dirawat intensif. ■ ann/sf

Anggota Komisi I DPR RI
TB Hasanuddin.
Foto: Azka/MAN



Standar Protokol Covid-19 Harus Diaplikasikan dalam Pilkada Serentak 2020



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa. Foto: Sugeng/MAN

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menyatakan bahwa sampai dengan hari ini keputusan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 masih tetap akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Hal ini ia utarakan guna menanggapi berbagai kekhawatiran dan jaminan apakah pelaksanaan Pilkada di tengah masa pandemi Covid-19 ini, dapat berlangsung dengan baik.

“Sampai dengan hari ini belum ada keinginan atau peluang untuk mengubah pelaksanaan Pilkada. Tinggal bagaimana semua pihak termasuk KPU menyusun PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) dengan benar-benar sesuai dengan standar protokol Covid-19 dan itu

mampu diaplikasikan di lapangan,” ucap Saan dalam salah satu sesi wawancara langsung dengan stasiun televisi swasta nasional, beberapa waktu yang lalu.

Terkait animo partisipasi masyarakat untuk mengikuti Pilkada di tengah pandemi Covid-19, Saan mengatakan, tingkat partisipasi pemilih harus benar-benar maksimal. Jangan sampai nanti partisipasinya berkurang drastis.

“Maka mulai saat ini dengan berbagai media yang dimiliki oleh KPU ataupun parpol, agar terus melakukan sosialisasi terkait dengan masalah Pilkada di tengah pandemi Covid-19 ini. Seluruh struktur jajaran KPU harus melakukan sosialisasi secara maksimal di tengah keterbatasan yang ada,” tandas politisi Partai NasDem itu.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Arief Budiman

”

MENJADI TANGGUNG JAWAB BERSAMA UNTUK MENJAGA DAN MEYAKINKAN AGAR PARTISIPASI PEMILIH TETAP TINGGI

menyampaikan, kekhawatiran apakah pelaksanaan Pilkada serentak 2020 akan berjalan baik juga kekhawatiran semua pihak, termasuk juga KPU. Oleh karenanya, untuk meminimalisir kekhawatiran tersebut KPU membuat beberapa persyaratan. “Ini bukan kekhawatiran akibat pandeminya, tetapi soal perdebatan hukum/regulasi. Untuk itu KPU meminta agar regulasinya harus kuat,” tegas Arief.

Menyangkut masalah dukungan anggaran pelaksanaan Pilkada, Arief mengatakan, apabila anggaran itu tidak dicairkan tepat waktu dan tepat jumlahnya, maka juga akan berisiko tidak bisa memenuhi standar protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

“Menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga dan meyakinkan agar partisipasi pemilih tetap tinggi. Kami tentu juga mengutamakan keselamatan dan kesehatan semua pihak, baik penyelenggara, peserta, sekaligus pemilih. Itulah mengapa dalam usulan anggaran, kami akan memasukkan tiga komponen itu di dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pemilihan kepala daerahnya. ■ dep/es

Pemerintah Harus Penuhi Kebutuhan Dana Pilkada 2020

Anggota Komisi II DPR RI Wahyu Sanjaya mengingatkan Pemerintah agar tidak lalai terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak yang disepakati akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Wahyu menegaskan, sejak awal ia sudah mengingatkan apabila Pilkada dilaksanakan pada tanggal tersebut akan berdampak pada akan diterapkannya protokol pencegahan virus Covid-19.

Wahyu menyatakan, seandainya Pilkada tidak diselenggarakan pada 9 Desember, maka permasalahan pendanaan Pilkada itu sudah selesai sejak awal. Pemaparan tersebut disampaikan Wahyu dalam Raker dan RDP Komisi II DPR RI dengan Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mendagri Tito Karnavian, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP dalam 'Pembahasan Rasionalisasi Anggaran Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020' secara kehadiran fisik dan virtual, Kamis (11/6).

"Kami sudah mengingatkan, bahwasanya apabila Pilkada dilaksanakan pada Desember akan berdampak pada akan diterapkannya protokol pencegahan Covid-19. Sudah dijelaskan oleh KPU RI seandainya tidak terjadi, permasalahan pendanaan Pilkada itu sudah selesai. Akan tetapi, karena kita harus melaksanakan dengan protokol Covid-19 maka dibutuhkan dana," ujar Wahyu.

Lebih lanjut, menurut politisi Partai Demokrat tersebut, anggaran dana yang disiapkan untuk KPU, Bawaslu dan DKPP sebagaimana diajukan masih

terlalu sedikit jika dibandingkan dengan pemberian penyertaan modal negara kepada PT. Hutama Karya sebesar Rp 75 triliun. Wahyu mengungkapkan, hal itu berarti sama dengan anggaran total gabungan dari KPU, Bawaslu dan DKPP ini kalah dengan satu PT (Hutama Karya).

Padahal, sambung legislator dapil Sulawesi Selatan II ini, KPU, Bawaslu dan DKPP menyelenggarakan agenda penting negara berupa Pilkada serentak di 270 Kabupaten/ Kota dan berpotensi akan terjadi penuluran secara massal terhadap 100 juta pemilih dan hampir 200 ribu penyelenggara. Jadi tegasnya, Pemerintah tidak bisa bermain-main dengan protokol kesehatan Covid-19 dalam Pilkada mendatang dan tidak boleh untuk uji coba.

"Jadi, saya berharap ke Ibu Menkeu agar apa yang diminta oleh KPU, Bawaslu dan DKPP itu dapat dipenuhi. Karena, ini bukan keinginan sepihak dari KPU, Bawaslu dan DKPP. Ini adalah dampak dari diterbitkannya Perppu 2/2020 dimana mereka harus melaksanakan Pilkada itu 9 Desember 2020. Apabila dananya tidak tersedia, saran saya Perppu diganti saja dimundurkan lagi 6 bulan. Jadi, tidak harus beli APD tidak harus beli segala macam itu. Kita tidak boleh berjudi atau mengambil risiko dengan keselamatan," tandas Wahyu. ■ pun/sf

Anggota Komisi II DPR RI Wahyu Sanjaya. Foto: Andri/MAN



Program Ketahanan Pangan Perlu Dikembangkan di Tengah Pandemi Covid-19

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mendorong Kementerian Pertanian untuk terus melakukan pengembangan program ketahanan pangan di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) ini. Meskipun kondisi saat ini bisa dibilang sulit karena Kementan sendiri mengalami pemotongan anggaran yang cukup besar, namun pengembangan inovasi harus dilakukan dengan mengandalkan efisiensi anggaran yang terbatas.

Poin itu disampaikan saat Sudin menjadi narasumber pada Webinar yang diselenggarakan oleh Badan Keahlian (BK) DPR RI dengan tema 'Menjaga Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19'. Turut hadir dalam Webinar ini Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang juga bertindak sebagai narasumber. Selain itu turut hadir Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar yang turut membuka Webinar ini.

Sudin menjelaskan, pengembangan ketahanan pangan yang dimaksud bisa melalui pengembangan usaha tani dan pekarangan dalam lingkup keluarga. "Perlu dikembangkan program ketahanan keluarga melalui pengembangan intensifikasi usaha tani, pekarangan dan usaha pengelolaan makanan serta pangan dalam upaya peningkatan produksi pangan dan pemenuhan kebutuhan pangan," ujar Sudin.

Di samping itu, ketahanan pangan pun bisa dilakukan dengan memberikan deregulasi perdagangan agar distribusinya tak terhambat. Dalam hal ini, Kementan pun perlu bekerja sama dengan kementerian terkait lain, seperti Kementerian Perhubungan. "Untuk memberikan jaminan usaha tani dan pemasaran hasil pertanian, perlu



Ketua Komisi IV DPR RI Sudin. Foto: Runi/MAN

deregulasi perdagangan antar pulau dan ekspor sehingga distribusi tidak mengalami hambatan," tuturnya.

Politisi PDI-Perjuangan ini juga menyayangkan kebijakan Pemerintah yang memangkas anggaran Kementan di tengah pandemi Covid-19 ini. Padahal di saat yang sama, kebutuhan pangan juga mengalami peningkatan. "Dalam rangka mendukung program pemerintah bidang pertanian dan antisipasi krisis pangan, seyogyanya anggaran sektor pertanian tidak mengalami pemotongan, bahkan seharusnya ditambah. Sehingga harus ada pengawasan kebijakan terhadap program dan anggaran yang lebih ketat," jelas Sudin sembari mengingatkan.

Ia juga mengakui, pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan terhadap sektor produksi pangan yang mengakibatkan roda perekonomian berjalan sangat lamban. Sehingga banyak sekali angka pengangguran dan kemiskinan baru. Namun semangat

bagi pelaku usaha pertanian harus tetap menggelora agar kebutuhan pangan bisa terpenuhi. Sebab jika kebutuhan pangan tak terpenuhi bisa mengakibatkan krisis sosial yang lebih besar.

Karena kondisi itu, Sudin pun menegaskan bahwa kesejahteraan dan pendapatan petani harus ditingkatkan. "Sektor pertanian harus jadi penggerak perkonomian nasional. Nantinya pertumbuhan pertanian harus lebih maju. Pendapatan petani harus ditingkatkan agar daya belinya tetap terjaga," ujar legislator dapil Lampung I itu sembari berharap melalui Webinar ini bisa mendapat masukan yang komprehensif.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pun juga mengutarakan upayanya agar ketahanan pangan di tengah Covid-19 ini bisa terwujud, namun hal itu perlu adanya kerja sama dari semua pihak seperti sinergi dengan kementerian lain, Komisi IV DPR RI dan unsur akademisi. ■ hs/sf

Perlu Inovasi Berkelanjutan untuk Optimalisasi Laut Indonesia

Anggota Komisi IV DPR RI Ema Ummiyatul Chusna mengatakan peringatan Hari Laut Internasional yang diperingati setiap 8 Juni harus menjadi perhatian bagi pemangku kebijakan untuk melakukan inovasi keberlanjutan guna menjaga kehidupan ekosistem laut dan juga optimalisasi untuk kesejahteraan rakyat, secara khusus bagi nelayan dan petambak garam.

Hal ini menurut politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) itu penting, karena wilayah laut Indonesia merupakan *Marine Mega-Biodiversity* atau keanekaragaman laut yang terbesar di dunia dan memiliki potensi sangat besar untuk menyokong perekonomian nasional.

“Meskipun demikian, kami berharap pengelolaan terhadap laut dapat dilakukan secara bijak, tidak boleh ada eksploitasi secara besar-besaran. Hal ini seiring dengan adanya perubahan tatanan global, kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan kami harap diarahkan ke arah inovasi peningkatan nilai tambah dan penguatan ekspor, serta peningkatan konsumsi dalam

”

MASYARAKAT MEMERLUKAN ASUPAN GIZI YANG CUKUP UNTUK MENINGKATKAN DAYA TAHAN TUBUH, PROGRAM GEMARIKAN DARI PEMERINTAH DINILAI SUDAH BAIK DAN PERLU DITINGKATKAN

negeri,” ujar Ema dalam rilis yang diterima *Parlementaria*, Selasa (9/6).

Dari poin-poin tersebut sebenarnya sudah sejalan dengan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tahun 2030 diantaranya mengurangi angka kelaparan dan gizi buruk. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga menargetkan angka *stunting* di bawah 14 persen pada tahun 2024 atau setengah dari angka saat ini yang masih pada kisaran 28 persen.

Ema melanjutkan, dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti ini, masyarakat memerlukan asupan gizi yang cukup untuk meningkatkan daya tahan tubuh, program Gemarikan dari Pemerintah dinilai sudah baik dan perlu ditingkatkan. “Adanya penambahan

anggaran oleh Kemenkeu sebesar Rp 677,2 triliun untuk penanganan Covid-19 kami harap bisa dialokasikan untuk program-program yang bisa menyentuh langsung ke masyarakat, seperti Gemarikan,” lanjutnya.

Selain itu, salah satu target SDGs lainnya yaitu, menjaga kehidupan ekosistem laut. Dalam kesempatan peringatan hari laut sedunia ini, legislator dapil Jawa Timur VIII ini juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk peduli menjaga laut seperti tidak membuang sampah ke laut, dan tidak melakukan penangkapan *overfishing*. “Dimana tindakan-tindakan tersebut menjadi ancaman kerusakan biodiversitas laut. Kami meminta masyarakat juga turut berperan aktif memberantas *illegal fishing*,” tutup Ema. ■ *hs/sf*



Anggota Komisi IV DPR RI Ema Ummiyatul Chusna. Foto: Runi/MAN

Legislator Desak Pemerintah Tinjau Ulang Kebijakan Tapera

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mendesak Pemerintah untuk meninjau ulang besaran simpanan peserta yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Suryadi mengimbau, isi kebijakan PP Tapera seharusnya lebih memperhatikan kondisi perekonomian dampak dari pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih berlangsung.

Suryadi mengingatkan, di tengah pandemi Covid-19 pula, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bahkan hanya sebesar 0 persen. "Dengan kondisi perekonomian yang seperti sekarang ini, di mana konsumsi rumah tangga juga mengalami penurunan yang sangat signifikan, maka seharusnya Pemerintah berhati-hati pada saat menetapkan PP 25/2020," kata Suryadi dalam keterangan tertulisnya baru-baru ini.

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tersebut mengungkapkan, Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera yang menjadi dasar terbitnya PP 25/2020 ini pada awalnya dilahirkan untuk membantu pekerja atau buruh dalam memenuhi kebutuhan perumahan.

"Kejutannya adalah terkait besaran simpanan peserta yang ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji atau penghasilan pekerja. Yakni, di mana 0,5 persen ditanggung oleh pemberi kerja dan 2,5 persen ditanggung oleh pekerja itu sendiri," imbuh legislator daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Barat II tersebut.

Sebelumnya diketahui, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana

”

DENGAN KONDISI PEREKONOMIAN YANG SEPERTI SEKARANG INI, DI MANA KONSUMSI RUMAH TANGGA JUGA MENGALAMI PENURUNAN YANG SANGAT SIGNIFIKAN

Tapera Ariev Baginda Siregar baru-baru ini menargetkan 13 juta peserta atau nasabah Tapera dalam lima tahun periode tabungan perumahan tersebut beroperasi. Peserta nasabah Tapera tahap awal berasal dari kelompok peserta Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berjumlah sekitar 4,2 juta orang.

Anggota Komisi V DPR RI
Suryadi Jaya Purnama.
Foto: Rumi/MR

Segmen peserta yang menerima manfaat berupa pembiayaan perumahan adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Nantinya, kelompok peserta yang menjadi nasabah Tapera terdiri dari ASN, pegawai BUMN, BUMD, dan BUMDes, personel TNI-Polri, pegawai swasta, wiraswasta atau pekerja mandiri dan tenaga kerja asing atau pekerja WNA yang telah bekerja minimal enam bulan di Indonesia.

■ pun/sf



Komisi VI-Menteri BUMN Raker Bahas Program PEN



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima (kanan) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. Foto: Azka/MAN

Komisi VI DPR RI bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggelar rapat kerja membahas rangkaian skema program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dituangkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020. Rapat yang digelar secara virtual dan dihadiri secara fisik beberapa Anggota Dewan tersebut membahas hal-hal yang berkaitan dengan dana dukungan Pemerintah terhadap sektor BUMN.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima selaku pimpinan rapat meminta Menteri BUMN untuk memaksimalkan dana dukungan tersebut guna menghidupkan kembali perekonomian nasional

lewat perusahaan-perusahaan BUMN. “Supaya, pertumbuhan ekonomi yang saat ini diperkirakan negatif itu tetap bisa kita lakukan semaksimal mungkin untuk tetap tumbuh baik,” ujar Aria di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6).

Politisi PDI-Perjuangan ini pun mendorong agar pemberian dana dukungan Pemerintah nantinya dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi negara. Serta, dapat menggali potensi dalam negeri untuk pertumbuhan berkualitas, baik perluasan lapangan kerja maupun kontribusi terhadap penerimaan negara ke depannya.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengaku terus berfokus melakukan restrukturisasi dalam

upaya menyetatkan BUMN dan memperbaiki kondisi internal mereka. Erick berharap upaya ini dapat serta merta meningkatkan kinerja dan menghasilkan peningkatan nilai tambah melalui pajak dan dividen.

“Presiden telah menerbitkan Keppres (Keputusan Presiden) Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan Restrukturisasi BUMN. Yang selanjutnya akan dibuat Surat Keputusan Bersama antara Menteri BUMN dengan Menteri Keuangan mengenai tata kerja pelaksanaan tim tersebut. Kita terus berharap upaya ini salah satu cara mengembalikan pemasukan negara akibat Covid-19,” terangnya. ■er/sf

Andre Rosiade Usul Digitalisasi Pencatatan Meteran Listrik PLN

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade memberi saran agar pencatatan meteran listrik yang selama ini dilakukan secara manual oleh PLN segera di-digitalisasi. Sebab, cara manual telah menimbulkan banyak masalah kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19 ini, serta dianggap kuno dan tidak efektif penggunaannya.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja virtual Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6). Menurutnya, digitalisasi pencatatan akan memberikan banyak manfaat serta tangguh dalam menghadapi berbagai situasi seperti halnya wabah Covid-19 ini.

“Jadi kalau nanti ada wabah apapun juga, kita cukup dari kantor PLN nanti sudah tahu berapa tagihan listrik masyarakat.

Sehingga, tidak ada lagi perdebatan dan kecurigaan masyarakat di tengah wabah pandemi Covid-19 ini Pemerintah dan

”

SEHINGGA TIDAK ADA LAGI PERDEBATAN DAN KECURIGAAN MAYARAKAT DI TENGAH WABAH PANDEMI COVID-19 INI PEMERINTAH DAN PLN DIAM-DIAM MENAIKKAN TDL

PLN diam-diam menaikkan TDL (Tarif Dasar Listrik). Ini harus jadi pertimbangan untuk memperbaiki kualitas kinerja PLN ke depan,” saran politisi Partai Gerindra ini.

Sebelumnya diketahui bahwa pada bulan Maret dan April 2020, pencatat meteran dari PLN tidak bisa datang ke rumah pelanggan. Akibatnya, tagihan pelanggan diambil berdasar tagihan rata-rata tiga bulan sebelumnya, yaitu sejak Desember 2019-Februari 2020. Andre menilai, hal ini menjadi penyebab utama tagihan pelanggan membengkak hingga 50-100 persen.

“Saya juga sudah sampaikan ke PLN secara langsung karena saya membaca bahwa ada relaksasi cicilan tiga bulan. Saya usul langsung untuk di-*bikin* cicilannya itu hingga enam bulan. Karena hampir seluruh rakyat Indonesia terdampak Covid-19, ekonominya terpapar dan kesulitan. Maka, saya minta juga pada pak Menteri kalau bisa cicilannya dibuat enam bulan,” usul legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat I itu. ■ er/sf

Anggota Komisi VI DPR RI
Andre Rosiade.
Foto: Azka/MAN



PLN Harus Buka Posko Pengaduan Terkait Lonjakan Tagihan Listrik

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta PLN segera membuka posko pengaduan baik secara *online* atau langsung. Hal itu menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait lonjakan tagihan listrik selama tiga bulan terakhir. PLN juga diminta menjelaskan secara rinci penyebab kenaikan tagihan listrik masing-masing per pelanggan.

“PLN jangan hanya berpatokan pada argumentasi standar bahwa lonjakan ini terjadi karena ada perubahan sistem penghitungan yang semula berdasar angka catat meter menjadi angka rata-rata. Karena faktanya, ada banyak kasus lonjakan kenaikan yang melebihi angka rata-rata selama 3 bulan terakhir. Bahkan, ada pelanggan yang mengalami lonjakan tagihan hingga 300 persen,” papar Mulyanto dalam siaran pers-nya, baru-baru ini.

Ditambahkannya, jika benar penghitungan berdasarkan angka rata-rata pemakaian selama 3 bulan terakhir, angkanya tidak mungkin melonjak secara drastis. Ia meyakini, ada faktor lain yang perlu dijelaskan PLN. Dan itu tentu harus disampaikan secara jelas kepada setiap pelanggan. Dengan kata lain, jangan biarkan pelanggan bingung dan menerka-nerka penyebab lonjakan tagihan listrik. Keluhan-keluhan tersebut harus ditanggapi segera. PLN perlu membuat terobosan baru dalam penghitungan tagihan listrik. Jangan lagi menggunakan cara lama yang merugikan masyarakat.

“Sebagai perusahaan yang didukung Sumber Daya Manusia



Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: Azka/MAN

(SDM) yang unggulan dan teknologi mutakhir, harusnya PLN mampu menyediakan berbagai alternatif sistem penghitungan tagihan listrik secara cepat. Bila perlu, dibuat sistem atau aplikasi tagihan secara interaktif, agar pelanggan bisa mengecek besaran tagihan yang perlu dibayarkan. Jika dinilai tidak sesuai dengan penggunaan maka saat itu pelanggan bisa mengajukan keberatan,” ungkapnya.

Semua itu, menurut politisi dari Fraksi PKS ini, semata untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sehingga, sudah sewajarnya jika PLN mengembangkan sistem pelayanan tagihan listrik di masa pandemi ini. Hal ini untuk memudahkan pelanggan dalam melaporkan angka

meteran listrik di rumahnya masing-masing secara akurat dan tepat waktu

Terkait dengan kisruh lonjakan tarif ini, Mulyanto juga meminta PLN meniadakan untuk sementara sanksi, denda dan pemutusan listrik bagi pelanggan yang tidak dapat membayarkan tagihan. Masyarakat harus diberi kesempatan mengklarifikasi besaran tagihan yang menjadi kewajibannya.

“Intinya selesaikan dulu soal penghitungan tagihan listrik ini. Jangan sampai masyarakat dikenakan sanksi untuk sesuatu yang belum jelas duduk perkaranya. Selama PLN belum dapat menyelesaikan urusan penghitungan tagihan listrik ini sebaiknya penerapan sanksi denda dan pemutusan sambungan ditiadakan,” pungkasnya. ■ *ayu/es*

Tidak Lazim, Menag Batalkan Ibadah Haji tanpa Konsultasi DPR

Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis menyalahkan sikap Kementerian Agama RI membuat keputusan pembatalan penyelenggaraan ibadah Haji 2020 tanpa berkonsultasi dengan Komisi Agama terlebih dahulu.

“Ini tidak lazim dalam mekanisme bernegara, tanpa konsultasi dan melakukan rapat dengan Komisi VIII DPR. Kami Fraksi PKS memprotes sikap yang tidak bijak tersebut,” ujar politisi F-PKS itu dalam rilis yang diterima *Parlementaria*, beberapa waktu yang lalu. Iskan juga mempertanyakan, penundaan Rapat Kerja yang sedianya diagendakan tanggal 2 Juni 2020 dibatalkan tanpa ada penjelasan.

“Keputusan mendadak ini mengagetkan saya. Seharusnya, Kemenag RI menunggu dulu keputusan dari Pemerintah Arab Saudi demi menjaga hubungan bilateral kedua negara,” tekan legislator dapil Sumatera Utara II ini. Menurut Iskan, sebaiknya pemerintah Indonesia menunggu

keputusan Pemerintah Arab Saudi, baru kemudian diputuskan. Sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi sendiri meminta untuk menunggu.

“Bagaimana kalau Pemerintah Arab Saudi tersinggung? Kami F-PKS tidak bertanggung jawab atas keputusan sepihak Menteri Agama ini. Saya khawatir ada efek menjadikan, hubungan Indonesia dan Saudi merenggang. Seharusnya, dikomunikasikan dulu dengan Menteri Haji Saudi atau konsultasi dengan Kemenlu RI,” pungkasnya.

Selain itu, lanjut Iskan, Menteri Agama Fachrul Razi ini sudah melangkahi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Umrah dan Haji, terutama pada pasal 46, 47, dan 48. Di pasal itu diatur kebijakan-kebijakan Kementerian Agama terhadap penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harus dengan persetujuan bersama DPR RI. ■mh/sf



Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis.
Foto: Azka/MAN

”

KEPUTUSAN MENDADAK INI MENGAGETKAN SAYA, SEHARUSNYA KEMENAG RI MENUNGGU DULU KEPUTUSAN DARI PEMERINTAH ARAB SAUDI DEMI MENJAGA HUBUNGAN BILATERAL KEDUA NEGARA

Pemerintah Dinilai Abaikan Putusan MA Soal Kenaikan Iuran BPJS



Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Asmara. Foto: Jaka/MAN

Pemerintah kembali menetapkan aturan kenaikan iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Perpres Nomor 64 Tahun 2020, setelah sebelumnya Perpres Nomor 75 Tahun 2020 dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung (MA). Dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri PMK, Menteri Kesehatan, DJSN, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Asmara angkat suara terkait hal tersebut.

“Isi Putusan MA yang membatalkan Pasal 34 pada Perpres Nomor 75 Tahun 2020 ini agak kami sitir, meski Pemerintah sudah membuat aturan kembali, tetapi kami perlu mengingatkan Pemerintah bahwa dalam putusan MA tersebut, terdapat pada satu konsen, yakni permasalahan defisit dana jaminan sosial yang harus ditangani adalah manajemen atau tata kelola BPJS secara

keseluruhan,” kata Dewi di sela-sela mengikuti Raker di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6).

Meski sudah dibatalkan, politisi Partai Golkar itu mengingatkan agar Pemerintah tidak semudah itu membuat kembali aturan penggantinya. Meski secara regulasi hal tersebut dibenarkan, tetapi perlu diingat bahwa masih adanya sejumlah poin penting dalam putusan MA, bahkan yang juga terdapat dalam pendalaman rapat DPR RI dan Pemerintah sebelumnya, yang belum terlihat upaya Pemerintah mentaatinya.

“Setidaknya ada 4 catatan MA, yaitu tidak seriusnya kementerian-kementerian terkait dalam berkoordinasi menyelenggarakan JKN, ketidakjelasan eksistensi DJSN dalam merumuskan kebijakan umum, adanya *fraud* dalam pengelolaan dan pelaksanaan JKN oleh BPJS Kesehatan, dan mandulnya satuan pengawas internal BPJS dalam

melaksanakan pengawasan,” tegas Dewi.

Dengan belum adanya intensi Pemerintah untuk melakukan upaya perbaikan, Dewi menilai hal tersebut menjadi hal yang kurang mendapat perhatian dari Pemerintah terkait, termasuk Menko PMK, Menteri Kesehatan, dan BPJS Kesehatan itu sendiri. “Bukan semata-mata mengganti dengan yang baru tetapi lakukan perbaikan ini. Karena ini sudah dilakukan DPR dan BPKP dalam audit yang terdahulu bahkan dengan Komisi IX,” imbuhnya.

Untuk itu, Dewi sepedapat putusan MA yang menyatakan bahwa kesalahan Pemerintah tersebut tidak boleh dibebankan kepada masyarakat dengan menaikkan iuran. “Pemerintah terkesan melakukan pembiaran terhadap kecurangan-kecurangan yang terjadi, sebagaimana terdapat pada putusan MA di halaman 64. Kami mendesak agenda penguatan sistem jaminan sosial ini harusnya berfokus pada perbaikan kualitas pelayanan dan perbaikan tata kelola, bukan hanya bagaimana meningkatkan kontribusi iuran masyarakat,” kritik legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat IV itu.

Perlu diketahui, besaran iuran JKN peserta PBU dan BP atau disebut juga peserta mandiri untuk bulan Januari, Februari dan Maret 2020 mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019, yaitu Rp 160.000 untuk Kelas I, Rp 110.000 untuk Kelas II, dan Rp 42.000 untuk Kelas III.

Sementara untuk bulan April, Mei dan Juni 2020 besarnya masih mengikuti Perpres Nomor 82 Tahun 2018. Per 1 Juli 2020, iuran peserta PBU dan BP disesuaikan menjadi Rp 150.000 untuk Kelas I, Rp 100.000 untuk Kelas II, dan Rp 42.000 untuk Kelas III. ■ alw/sf

Tahun Ajaran Baru Tetap Belajar Jarak Jauh

Memasuki tahun ajaran baru, lembaga-lembaga pendidikan diimbau tetap menggelar pembelajaran jarak jauh, karena Covid-19 belum betul-betul hilang. Pemerintah sendiri menetapkan tahun ajaran baru pada 13 Juli 2020. Namun, itu bukan berarti sekolah kembali dibuka.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyerukan hal ini dalam rilisnya, Rabu (3/6). Untuk membuka kembali sekolah,

mekanismenya agak ketat. Semua akan diatur oleh Tim Gugus Tugas Covid-19. Hetifah sangat mendukung kebijakan ini. “Keselamatan siswa menjadi prioritas utama. Hal-hal lainnya seperti ketuntasan kurikulum itu nomor dua. Dengan kondisi saat ini, sebaiknya memang pembelajaran tatap muka ditunda dulu,” ujarnya.

Pemerintah seharusnya fokus saja pada peningkatan kualitas pembelajaran jarak jauh. Menurut politisi Partai Golkar itu, Pemerintah juga harus mengevaluasi pembelajaran jarak jauh (PJJ) di tahun ajaran

kemarin. Ada banyak hal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kualitas PJJ. “Salah satunya adalah koordinasi secara aktif dengan Kemenkominfo untuk meningkatkan akses internet hingga ke daerah 3T,” ungkap Hetifah.

”

KESELAMATAN SISWA MENJADI PRIORITAS UTAMA. HAL-HAL LAINNYA SEPERTI KETUNTASAN KURIKULUM ITU NOMOR DUA. DENGAN KONDISI SAAT INI, SEBAIKNYA MEMANG PEMBELAJARAN TATAP MUKA DITUNDA DULU

Menyambut tahun ajaran baru, kapasitas guru dan orangtua dalam melaksanakan pembelajaran daring perlu pula ditingkatkan. Ke depan sebaiknya semua kebijakan diarahkan ke persoalan tersebut dibanding kembali melakukan 100 persen tatap muka. Hetifah menambahkan, pada sebagian daerah masih ada yang kesulitan menerapkan PJJ.

“Untuk daerah-daerah tertentu yang memang sangat sulit melaksanakan PJJ, mungkin harus dibuka demi memastikan pelayanan pendidikan tetap berjalan. Namun demikian, ini merupakan opsi terakhir,” imbau Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut. Ada persyaratan ketat yang harus dipenuhi penyelenggara pendidikan agar para peserta didik tidak terjangkit wabah Covid-19.

“Antara lain harus berada di zona hijau, kalau bisa hanya yang nihil kasus Covid-19. Standar sarana prasarana yang mendukung protokol kesehatan juga harus terpenuhi, seperti adanya sarana cuci tangan dan sistem UKS yang memadai. Jika prasyarat ini belum bisa dipenuhi, sebaiknya jangan mengambil risiko.” pungkasnya. ■ mh/es

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Foto: Jaka/MAN



Implementasi Pemulihan Ekonomi saat *New Normal* Harus Cepat dan Tepat

Sejumlah daerah mulai menggali kembali aktivitas sosial dan ekonominya. Melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Pemerintah telah mengizinkan 102 kabupaten/kota di yang dinyatakan sebagai zona hijau di 23 provinsi, untuk melanjutkan kegiatan sosial dan ekonomi. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, masyarakat dihadapkan dengan kenormalan baru, atau *new normal*.

Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengatakan, *new normal* sudah tepat, mengingat konsep penanganan masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi dapat berjalan seiring dan simultan. Dengan dibukanya kembali aktivitas ekonomi dengan mematuhi protokol kesehatan, diharapkan laju pertumbuhan ekonomi dapat bertahan dari laju penurunan yang lebih dalam.

“Meski berjalan bersamaan, sejumlah sektor perlu mendapat prioritas utama. Salah satunya dengan menjaga daya beli masyarakat, mengingat konsumsi rumah tangga berkontribusi terhadap 59,4 persen terhadap PDB melalui program-program bansos, subsidi listrik, dan sebagainya,” kata Andreas dalam melalui sambungan telepon dengan *Parlementaria*, Senin (8/6).

Berbeda dengan perekonomian negara lain yang mengandalkan sektor ekspor, perekonomian dalam negeri masih diuntungkan karena mengandalkan sektor domestik. “Karena itu yang harus disiapkan, pertama adalah daya beli, baru kemudian membantu dunia usaha



Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo. Foto: Arief/MAN

untuk segera kembali menjalankan aktivitasnya, terutama UMKM, dengan penerapan *new normal*” paparnya.

Terkait hal itu, politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini memaparkan bahwa usaha seperti UMKM punya kemampuan menyerap 89,2 persen tenaga kerja, serta berkontribusi sekitar 60 persen terhadap PDB. “Pemulihan sektor UMKM akan menjadi *key success factor* pemulihan sektor riil. Skemanya dengan subsidi bunga, penempatan dana, penjaminan untuk modal kerja, insentif pajak, dan sebagainya,” imbuhnya.

Untuk itu, legislator dapil Jawa Timur V itu mendorong agar implementasi harus bisa dieksekusi dengan cepat dan tepat sasaran. Pada bantuan sosial misalnya, penerimanya harus

bisa benar-benar yang membutuhkan. Pada sektor UMKM, ia mendorong agar berbagai rencana keringanan dapat segera diimplementasikan. Hingga kini, kedua hal tersebut telah masuk dalam alokasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Ke depannya, agar Kuartal II dan selanjutnya tidak lebih dalam apalagi sampai minus, ini berarti diperlukan kecepatan dari eksekusi program tersebut. Bagaimana skema subsidi kepada UMKM bisa segera dijalankan, bagaimana skema penjaminan bisa berjalan. Selain itu konsep *sharing the pain* atau berbagi beban, baik antara Pemerintah, Kemenkeu, BI, OJK, dan Perbankan harus dilakukan, sudah saatnya menerapkan gotong-royong secara besar,” pungkas Andreas. ■ atw/sf

PPN Digital yang Cukup Besar Harus Dihadapi Hati-Hati

Implementasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk produk perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) saat ini merupakan waktu yang sangat tepat. *Traffic digital* di Indonesia pasti meningkat karena adanya kebijakan *work from home* (WFH). Dengan kata lain, PPN digital cukup besar, namun Pemerintah harus tetap berhati-hati menghadapinya.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengemukakan hal ini dalam keterangan persnya kepada *Parlementaria*, Rabu (10/6). Dijelaskannya, potensi penerimaan pajak digital ini, dihitung dari proyeksi pendapatan perusahaan PMSE dalam setahun dan dikalikan PPN 10 persen. Dengan asumsi tingkat kepatuhan pajak sebesar 50 persen, diperkirakan potensi penerimaan pajak sektor ini bisa mencapai Rp 530 miliar.

Jumlah tersebut, nilai Hergun, sapaan akrab Heri Gunawan, cukup

besar bagi penerimaan negara, terlebih di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini. Namun, ada persoalan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2020 yang akan diberlakukan 1 Juli nanti. Pertama, pelaku usaha yang dari luar negeri seperti Zoom, Netflix, dan sebagainya bisa menekan Pemerintah dari masing-masing negaranya untuk melakukan intervensi. Terutama pelaku usaha digital dari China yang memang pemerintahnya memiliki peran besar.

Kedua, sambung politisi Partai Gerindra itu, dengan adanya bukti bahwa kegiatan pelaku usaha PMSE mempunyai *significant economic presence*, maka implementasinya harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Data yang pasti hanyalah dimiliki oleh perusahaan, negara mungkin hanya bisa memperkirakan, harus benar-benar tepat sasaran. Ketiga, data digital merupakan barang tak kasat mata, bukan seperti aset atau barang yang

berwujud. Pemerintah harus lebih detail mengetahui transparansi transaksi digital dari setiap konsumen.

Keempat, masih kata Hergun, Pemerintah perlu menghitung dampak perpindahan konsumen ke berbagai situs yang masih bebas menjual tanpa ada kewajiban PPN. "Sebaiknya Pemerintah dapat memilih transaksi digital mana dulu yang harus dikenakan PPN, serta mana yang harus dibiarkan layanannya berjalan tanpa PPN guna memberikan produk yang murah kepada masyarakat. Artinya, dalam penerapan awal nanti, Pemerintah bisa melakukannya secara bertahap, sesuai produk prioritas yang bisa dikenakan PPN agar masyarakat bisa menyesuaikan diri secara perlahan," paparnya.

Menurut Anggota Baleg DPR RI ini, masih ada celah masalah dalam PMK bagi transaksi PMSE. Pemerintah harus memperhatikan setiap detail yang bisa berpotensi menjadi masalah di kemudian hari, terutama perusahaan-perusahaan besar dari luar negeri. "Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Niat menambah pajak, jangan sampai malah merugikan dengan memicu negara lain menerapkan hal yang lebih besar dan memberikan dampak negatif bagi Indonesia," imbuh Hergun.

PMK 48/2020 itu bertujuan menambah penerimaan pajak sekaligus melengkapi UU PPN dan aturan pelaksanaan yang sudah ada khususnya memberikan dasar hukum untuk menunjuk pelaku usaha luar negeri sebagai pemungut PPN atas penjualan produk digitalnya. Otoritas pajak di dalam negeri harus sudah melakukan pendekatan dan komunikasi dengan perwakilan yurisdiksi yang merupakan pelaku usaha dari Amerika Serikat, Australia, China, Hong Kong, India, Inggris, Jepang, Singapura, Swedia, dan Thailand. ■ mh/sf



Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. Foto: Azka/MAN

Baleg Terima Audiensi IJTI Bahas *Omnibus Law* Ciptaker

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI beraudiensi dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) untuk menerima masukan dan pandangan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) *Omnibus Law* Cipta Kerja. Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya memimpin jalannya RDPU tersebut yang digelar secara virtual dan fisik.

“Kami mengundang Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia untuk bisa memberikan masukan dan pandangannya terkait *Omnibus Law* Cipta Kerja ini,” kata politisi Fraksi Partai NasDem ini saat membuka RDPU Baleg DPR RI dengan IJTI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6).

Ketua IJTI Yadi Hendriana menyampaikan pandangan komunitas pers terhadap RUU Cipta Kerja. Menurutnya, insan pers menolak revisi kedua pasal tersebut dengan alasan menghindari adanya intervensi Pemerintah dalam kemerdekaan pers. Dia menambahkan, pengaturan oleh Peraturan Pemerintah (PP) mengenai jenis, besaran denda, tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif membuka intervensi kemerdekaan pers.

Sebaliknya, lanjut Yadi, pers membutuhkan *domestic policy* yang dapat melindungi media nasional dari ancaman *platform* asing dan sebagai bentuk keberpihakan pada media nasional. “Kita butuh *domestic policy*, untuk melindungi Pers Nasional, selain menjaga kebebasan pers perlu regulasi yang memproteksi pers nasional dan membatasi gurita *platform* asing, faktanya

kita tidak punya satu UU pun untuk menangani ini,” kata Yadi.

Menanggapi hal itu, Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo mengusulkan penghapusan pasal-pasal terkait pers dan media dalam RUU Cipta Kerja yang dinilai berpotensi menimbulkan multitafsir. “Kami usulkan terkait dengan media dan pers untuk di-*drop* dari RUU Cipta Kerja,” kata Firman sembari menambahkan, media dan pers sudah diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga lebih baik diperkuat dalam UU yang ada.

Sependapat dengan politisi senior partai Golkar tersebut, Anggota Baleg DPR RI Taufik Basari mempertanyakan relevansi pers dalam RUU Cipta Kerja. Dia pun akan menanyakan hal itu dalam rapat kerja Baleg dengan Pemerintah mendatang. Menurutnya, tidak masalah jika Pemerintah

mengeluarkan poin tentang Pers dari RUU Cipta Kerja, agar rancangan tersebut fokus mengatur kemudahan usaha dan perizinan.

“Terkait pers ini saya belum melihat ada kaitannya sehingga perlu dibahas. Saya akan mempertanyakan kepada Pemerintah apa yang menjadi dasar pemikiran mengapa isu pers masuk dalam RUU Ciptaker. Kalau argumentasinya tidak kuat atau tidak signifikan, tidak ada salahnya kita keluarkan saja (pasalnya), supaya kita lebih fokus pembahasannya soal kemudahan berusaha dan perizinan,” imbuh politisi Partai NasDem ini.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah melalui RUU Omnibus Law Cipta Kerja memasukkan revisi terhadap sejumlah pasal dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dalam draf Omnibus Law Cipta Kerja, Pemerintah merevisi pasal 11 dan pasal 18 pada UU Pers. ■ ann/sf



Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya memimpin jalannya RDPU Baleg DPR RI dengan IJTI. Foto: Gerald/IMAN

Kehutanan Harus Penuhi Aspek Ekologi-Sosial-Ekonomi

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) *Omnibus Law* Cipta Kerja bertujuan untuk mencari solusi agar perekonomian ke depan bisa berjalan serta regulasi yang tumpang tindih bisa diselesaikan secara maksimal tanpa mengabaikan norma-norma yang telah diatur dengan baik. Adapun, sambung Firman, dalam kaitannya mengenai lingkungan hidup dan kehutanan jika mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 jelas tersirat kehutanan seharusnya dapat dikelola, dimana menurutnya kepentingan ekologi, sosial dan ekonomi dapat terpenuhi secara seimbang.

Pemaparan tersebut disampaikan Firman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI dengan sejumlah akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memperoleh masukan tentang RUU Ciptaker di antaranya Prof. Dr. M Ramdan Andri Gunawan (Guru Besar Fakultas Hukum Univ Indonesia), Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf (Guru Besar Univ Katolik Parahyangan), Prof. Dr. Ir. H. San Afri Awang (Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM), dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang digelar secara *virtual*, Rabu (10/6).

Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Golkar tersebut mengungkapkan persoalan regulasi yang tumpang tindih mengakibatkan tiga aspek sub-sektor tadi tidak terkelola dengan maksimal. “Maka, saya menekankan hal tersebut harus dicarikan solusi dalam RUU Cipta Kerja ini untuk mengatur norma-norma yang mengatur keseimbangan atau kepentingan kehutanan yang meliputi tiga sub-sektor yakni aspek ekologi,



Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo. Foto: OJ/AMAN

sosial dan ekonomi,” ujar Firman.

Selain itu, Firman yang juga Anggota Komisi IV DPR RI ini menyoroti tentang bank tanah yang rencananya juga akan dirumuskan dalam RUU Ciptaker. Firman mengimbau, persoalan bank tanah perlu mendapat perhatian khusus untuk dipertimbangkan sebaik-baiknya apakah menjadi bagian penting dalam RUU Ciptaker nantinya. Mengingat, menurut Firman, ia mengkhawatirkan jika kalau bank tanah ini hanya untuk kepentingan pembangunan yang sifatnya pembangunan untuk kepentingan umum maka bank tanah tidaklah diperlukan.

Namun, saran Firman, cukup diperlukan satu keputusan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Badan Pertanahan

Nasional (BPN) dan instansi terkait untuk membuat kesepakatan. Yakni, untuk kepentingan umum cukup di-SK-kan sebagai dasar hukum pemanfaatan lahan hutan untuk pembangunan yang bersifat umum. Jika berdasar bank tanah, ia khawatir nantinya bisa saja disalahgunakan oleh kepentingan kelompok-kelompok tertentu.

“Walaupun, nantinya dikelola BUMN akan tetapi kepentingan orang per orang itu kan kita tidak bisa mendeteksi. Nah, ini saya rasa mohon mendapatkan pertimbangan *urgent* atau pentingnya bank tanah itu menjadi bagian yang sangat mendasar atau dipandang penting ataukah tidak. Kalau menurut saya pribadi, belum merasakan itu menjadi bagian yang penting,” tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah III itu. ■ pun/sf

Tingkatkan Layanan Bagi Dewan, Setjen DPR Gelar *Workshop* Keprotokolan

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menilai peran protokol sangat penting dalam sebuah instansi. Karena kinerja protokol sangat berpengaruh terhadap pembentukan citra sebuah instansi. Oleh karena itu tidak berlebihan jika kemudian Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar *workshop* keprotokolan dengan tema “Peningkatan Pelayanan Keprotokolan Bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI”.

“Setjen DPR RI sebagai unsur pendukung dewan, salah satu tugasnya mendukung kelancaran tugas Anggota DPR RI, baik di bidang administrasi, maupun persidangan. Dimana salah satu aspek dukungan tersebut adalah melalui keprotokolan, baik dalam acara, upacara dan penyaluran delegasi masyarakat,” ujar Indra saat membuka *Workshop* Keprotokolan di Gedung Nusantara, Senayan Jakarta, Senin (8/6). Ia berharap Setjen DPR RI mampu memberikan pelayanan prima kepada Pimpinan dan Anggota Dewan.

Indra menjelaskan, protokol yang profesional harus menguasai pengetahuan keterampilan dan kode etik keprotokolan. Petugas protokol juga harus memiliki komitmen yang kuat, konsisten dan berintegritas untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Sehingga memberikan kepuasan dan peka terhadap situasi yang sedang berlangsung, untuk mengambil tindakan apa yang harus dilakukan.

Dengan kata lain, lanjut Indra, sebagai tenaga profesional, petugas protokol juga harus mampu menjadi manajer yang mengatur jalannya kegiatan dengan baik. Dimana salah satu kunci



Foto bersama Sekjen DPR RI Indra Iskandar dengan pejabat di lingkungan Setjen DPR RI dan para pembicara *Workshop* Keprotokolan. Foto: Arief/MAN

sukses protokol adalah komunikasi dan koordinasi yang baik. Selain harus cekatan berkomunikasi dengan internal, juga harus mampu berkoordinasi dan komunikasi dengan pihak eksternal.

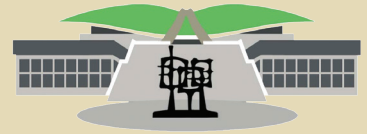
“Dan di saat pandemi Covid-19 ini, semua aspek keprotokolan kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI tetap harus kami lakukan. Semua protokol dan protap harus ditingkatkan, sehingga ketika masuk masa persidangan mendatang, tidak akan ada masalah lagi. Mulai dari pemeriksaan suhu tubuh, penempatan *hand sanitizer*, penggunaan masker seluruh Anggota DPR dan staf Kesetjenan,” papar Indra.

Indra menjelaskan, kegiatan-kegiatan tersebut setiap hari perlu dievaluasi. Selain itu, Kesetjenan DPR RI juga punya Satgas Covid-19 Setjen DPR RI, bertugas untuk memonitor setiap perkembangan protokol tersebut. “Sejatinya apa yang kami lakukan terkait protokol Covid

ini, juga mengacu pada peraturan yang sudah diatur oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, serta Gugus Tugas Nasional Covid-19,” jelas Indra.

Dijelaskan Kepala Keprotokolan Negara Andri Hadi, aturan tentang keprotokolan, ada dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Aturan Keprotokolan yang diterapkan Protokol Kenegaraan dapat berlaku secara universal dan menjadi acuan baik bagi institusi pemerintahan ataupun non-pemerintahan.

“Pengaturan tata tempat didasarkan pada kedudukannya, di mana orang yang berhak mendapat tempat paling utama adalah mereka yang mempunyai kedudukan yang paling tinggi, diikuti pejabat berikutnya. Jika berjajar, yang di sebelah kanan dari orang yang mendapat urutan tata tempat paling utama, dianggap lebih tinggi orang yang duduk di sebelah kirinya,” jelas Andri. ■ **ayu/es**



Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya (kanan) memimpin jalannya RDPU Baleg DPR RI secara kehadiran fisik dan virtual dengan IJTI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6). Foto: Gerald/IAN



Komisi VI DPR RI bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggelar rapat kerja membahas rangkaian skema program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dituangkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6). Foto: Azka/IAN



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar membuka *Workshop* Keprotokolan bertema "Peningkatan Pelayanan Keprotokolan Bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI" di Gedung Nusantara, Senayan Jakarta, Senin (8/6). Foto: Arief/Man

